

Partisipasi Politik Kontemporer dan Pandangan Generasi Muda mengenai Demokrasi di Kota Makassar (Studi Komunikasi Politik)

Contemporary Political Participation and Young People's Views on Democracy in Makassar City (A Study of Political Communication)

Oleh :

Rusmadi¹, Raidah Intizar Yusuf², Anil Hukma³

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Islam Makassar, Indonesia
rusmadimadi410@gmail.com¹, raidahintizar.dty@uim-makassar.ac.id², anilhukma70@gmail.com³.

Abstract

The purpose of this study is to describe how contemporary political participation of the younger generation and their views on democracy. The type of research used is descriptive quantitative with the technique of distributing questionnaires directly and through online questionnaires to 392 samples from the younger generation population in Makassar City. The results of the research that have been analyzed and interpreted, it can be stated that the description of the political participation of the younger generation in Makassar city is that the higher the hierarchy of political participation, the smaller the quantity of involvement of the younger generation. Meanwhile, the lower the hierarchy of political participation, the greater the quantity of involvement of the younger generation. This can be seen from the most striking response, namely participation in voting, with 73.1% of young people having voted and only 4.3% having held political or administrative positions. The views of the younger generation in Makassar city regarding democracy are that everyone is equally important in decision-making, no one group or group is excluded. In addition, everyone also has the opportunity to play a role in decision-making, regardless of the socio-economic background of the role, he or she has the opportunity to lead. This can be seen from the most prominent response regarding national leaders, where 86.0% of respondents believe that any ethnicity can be a leader.

Keywords: *Political participation; youth; Generation Z*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana partisipasi politik kontemporer generasi muda serta pandangan mereka mengenai demokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pembagian kuesioner secara langsung dan melalui kuisisioner dalam jaringan kepada sebanyak 392 sampel dari populasi generasi muda di Kota Makassar. Hasil penelitian yang telah dianalisis dan diinterpretasi, maka dapat dinyatakan kesimpulan bahwa gambaran partisipasi politik generasi muda di kota Makassar yaitu semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan generasi muda. Sedangkan semakin rendah hierarki partisipasi politik semakin besar kuantitas keterlibatan generasi muda. Hal tersebut dapat dilihat dari respon yang paling mencolok yakni partisipasi dalam pemungutan suara, dengan 73.1% generasi muda pernah melakukan voting dan hanya 4,3% yang pernah menduduki jabatan politik atau administratif. Pandangan generasi muda di kota Makassar mengenai demokrasi adalah semua orang sama pentingnya dalam pengambilan keputusan, tidak ada satu golongan atau kelompok yang dikecualikan. Di samping itu semua orang juga memiliki peluang berperan dalam pengambilan keputusan, terlepas dari latar sosio-ekonomi peran tersebut, ia berkesempatan untuk memimpin. Hal ini terlihat dari respon yang paling menonjol terkait pemimpin nasional, di mana 86.0% responden meyakini bahwa suku apapun bisa menjadi pemimpin.

Kata Kunci: Partisipasi politik; generasi muda; gen Z

PENDAHULUAN

Pemuda Makassar memiliki sejarah partisipasi demonstrasi yang cukup panjang, melalui intensitas pemberitaan di media, publik mengenal pemuda Makassar sebagai partisipator politik yang aktif dan hal tersebut telah dirangkum oleh sejumlah penelitian (Fitri, 2012; Hasse, 2012; Muhajir & Susanti, 2018; Primadi, 2013). Namun tahun 2013 merupakan tahun terakhir sebelum mobilisasi mahasiswa berskala besar menurun (Damarjati, 2019) dan menariknya penurunan ini terjadi bersamaan dengan perkembangan media sosial dan penetrasi internet yang semakin meluas sebagai sarana yang menyediakan lebih banyak akses (Heriyanto, 2015). Kemajuan teknologi internet dan komunikasi paralel dengan menurunnya aktivisme secara langsung, oleh karena masyarakat menemukan cara yang bersifat *ad-hoc* untuk keterlibatan sipil melalui media sosial (Gil de Zúñiga et al., 2014; Ida et al., 2020).

Penggunaan media sosial telah menggeser cara kita berinteraksi dengan individu lainnya (secara horizontal) dan dengan organisasi seperti media massa, pemerintah, dan lainnya (secara vertikal). Dengan adanya komunikasi horizontal di media sosial, remaja dapat dengan mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya dalam hal ketertarikan mereka terhadap suatu isu tertentu (Winarno, 2019). Sedangkan untuk komunikasi vertikal, media sosial telah memudahkan individu untuk mengakses sumber berita yang lebih luas, yang menyebabkan penurunan konsumsi media tradisional dan ketergantungan yang lebih besar pada platform digital untuk konsumsi berita di kalangan generasi muda (Lindawati, 2018), dan hal tersebut berasosiasi dengan partisipasi politik langsung (Yusuf et al., 2023). Dengan demikian, media sosial memiliki potensi besar bagi generasi muda untuk menjadi alat pendidikan dan aktivisme politik (Ida et al., 2020; Suwana, 2020). Bentuk aktivisme daring telah melengkapi aktivisme langsung.

Dalam negara demokrasi, partisipasi politik warga didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya setiap pengambilan keputusan politik harus melibatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan setiap kebijakan yang dikembangkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Sebagai wujud riil pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutseratakan warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik.

Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir November 2013 lalu menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap politik sangat rendah. LIPI melaporkan bahwa 60% responden survei yang dilakukan oleh lembaga di 31 provinsi dari 1.799 responden mengatakan mereka kurang atau sama sekali tidak tertarik dengan politik, dengan hanya sekitar 37% responden mengatakan mereka tertarik pada politik atau politik atau sangat tertarik. tertarik. dalam urusan pemerintahan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hosni Kamil Malik, menjelaskan masalah kurangnya minat masyarakat Indonesia terhadap isu politik sebagai berikut: “Saat ini kita menghadapi masalah jumlah pemilih. Sejak 1999.” “Partisipasi pemilih terus menurun sejak pemilu 2009.” Penurunan partisipasi pemilih juga berdampak pada penyelenggaraan pilkada. Di tingkat nasional, pilkada mengalami penurunan tingkat partisipasi pilkada, yaitu dari 55 menjadi 56% (Wanma, 2015).

Masalah politik di Indonesia seringkali mengalami pasang surut terkhusus pasca reformasi, partisipasi warga dalam arena politik menunjukkan tanda-tanda kelesuan yang tercermin dari penurunan kualitas dan kuantitas partisipasi politik. Misalnya saat menyiapkan pemilihan umum. Di beberapa wilayah Indonesia, masih terdapat isu terkait tingginya angka golput (golput) akibat ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai politik dan jumlah yang mereka laporkan. Pemberlakuan partisipasi politik selalu terancam oleh penggunaan kebijakan moneter untuk mempengaruhi proses pemilu seseorang. Untuk mengatasi semua masalah ini, pemerintah harus mengurangi golput dan

menerapkan sanksi tegas terhadap kebijakan moneter, yang juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan pemimpin.

Generasi muda adalah generasi yang memiliki banyak energi dan ide. Perannya begitu penting dalam membawa perubahan di bangsa ini. Dalam sambutan redaksi yaitu Ir. Soekarno pernah berkata, “Beri saya 10 anak muda, saya pasti akan mengguncang dunia,” sebuah penegasan akan pentingnya kekuatan anak muda untuk mempengaruhi dunia. Menurut UU No. 40 Tahun 2009, remaja adalah orang yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. Usia muda adalah masa perkembangan biologis dan psikologis. Selain itu, kaum muda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dalam arti positif, upaya beragam ini memenuhi syarat sebagai pembaharu yang kreatif dan inovatif. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, pengendali sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional, misalnya dengan menciptakan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka juga dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dengan mewujudkan pendidikan kewarganegaraan menjadi aktor yang lebih inovatif akan membawa perubahan yang lebih besar dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan negara.

Generasi muda dapat dijadikan pelopor dalam berbagai bidang pembangunan bangsa. Salah satunya dalam bidang politik. Ini bisa berupa partisipasi politik. Dalam sebuah negara, demokrasi adalah sesuatu yang esensial. Salah satu alasan utamanya adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tergantung pada derajat partisipasi politik.

Indonesia telah memberlakukan UU Kepemudaan Era Reformasi No. 40 Tahun 2009. Salah satu kata pasal 17(3) menyatakan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan melalui pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan demokratisasi. Di Sulawesi Selatan khususnya, hal itu dipertegas dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembinaan Kepemudaan. Pasal 12(1) menjelaskan bahwa pemuda berperan aktif sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan, yang menjelaskan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dijelaskan lebih lanjut secara rinci pada ayat (4) di bawah ayat (1) dicapai melalui pengembangan beberapa hal, antara lain pendidikan kewarganegaraan dan demokratisasi. Atas dasar hukum ini, merupakan landasan konstitusional bagi kaum muda untuk berpolitik.

Persaingan politik akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kaum muda semakin membentuk komunitas atau kelompok pemenangnya sendiri dalam persaingan politik. Sifatnya hanya sementara dan tidak lagi. Anak muda terlibat di luar struktur hukum ruang politik, partai politik adalah bagian darinya. Sebagai contoh, dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan tahun 2017 dan 2018, terdapat komunitas bernama “Sahabat Ahok” dan “Pemuda-NA” yang merupakan komunitas pemenang calon tertentu, yang bermukim di kalangan anak muda. Mereka memiliki gaya mereka sendiri dalam gerakan politik. Bentuknya konvensional, Gabriel Almond (dalam Mas'ood dan MacAndrews 2000:67) menyatakan bahwa bentuk konvensional yang dimaksud adalah partisipasi politik, misalnya. B. rtisipasi politik, misalnya. B.Voting, partisipasi dalam diskusi politik, partisipasi dalam kegiatan kampanye pemilu, pendidikan dan keanggotaan dalam kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pemimpin politik dan administratif. Partisipasi ini merupakan bentuk kerelawanan politik dalam demokrasi Indonesia yang semakin matang. Padahal, negara telah mengamanatkan partai politik untuk memberikan pendidikan dan ruang politik kepada generasi muda, namun kenyataannya tidak ada.

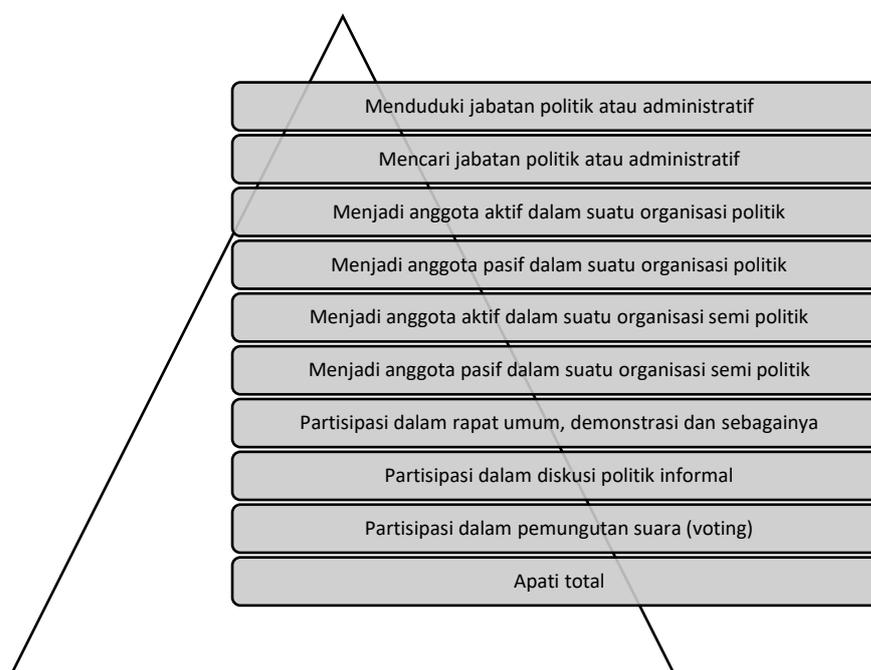
Pemilihan Umum tahun 2019 merupakan pemilihan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berlangsung bersamaan dengan pemilihan calon anggota legislatif (caleg) dari tingkat pusat hingga daerah. Tahun ini ada fenomena baru dalam peristiwa protes politik. Terutama dalam pemilihan caleg di tingkat daerah yang ditandai dengan keterlibatan beberapa kelompok anak muda sebagai caleg atau peserta. Kaum muda sudah berani mengambil posisi penataan di partai politik dan memperebutkan kursi kekuasaan. Ini adalah simbol lahirnya gen baru dalam politik. Abugaza (2013:1) menyebutkan bahwa gen dalam politik dapat diartikan sebagai

budaya politik yang mencerminkan perilaku politik individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Pembawa gen dalam politik adalah arus informasi yang sesuai dengan preferensi masyarakat.

Ada tiga hal utama yang harus dipenuhi ketika gen ini terbentuk 1) Menciptakan kelompok masyarakat yang berisi kumpulan generasi muda yang tidak memiliki beban terhadap masa lalu. 2) Membentuk konektivitas dengan dunia luar, konektivitas dengan dunia luar bisa diciptakan dengan internet atau media sosial. 3) Memiliki basis keilmuan (etika, kepakaran, dan profesionalisme) yang baik. Ketiga kriteria tersebut dianggap tepat oleh kalangan muda yang terlibat sebagai pemilih (Abugaza, 2013). Sebagai gen baru dalam politik, penulis tertarik untuk melihat atau menganalisis secara lebih mendalam pola partisipasi pemuda di Makassar, seperti yang terjadi pada tahun 2022 yang jumlah populasi dikota Makassar mencapai 739.480 jiwa partisipasi politik generasi mudah mulai dari partisipasi dalam pemilu dan aksi hingga mereka yang aktif berpartisipasi dalam politik praktis.

Partisipasi Politik

Menduduki jabatan politik atau administratif merupakan hirarki tertinggi dari partisipasi politik (Rush & Althoff, 1971). Sedangkan hirarki terendah dari keterlibatan politik adalah orang yang sama sekali apatis, yaitu orang yang tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun. Semakin tinggi hirarki partisipasi politik maka semakin rendah tingkat keterlibatan masyarakat, seperti terlihat pada diagram hirarki partisipasi politik, di mana garis vertikal segitiga melambangkan hierarki.



Sumber: Rush dan Althoff, 1971

Dari uraian Rush dan Althoff di atas, dapat diduga bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu komunitas untuk terlibat dalam kegiatan politik, semakin sedikit orang yang terlibat. Sebaliknya, semakin rendah tingkatnya, semakin kecil peluang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Yang digunakan Rush dan Althoff untuk menjelaskan hirarki ini adalah bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan dalam arti luas yang paling mudah diamati dalam masyarakat kita adalah partisipasi dalam pemilu.

Namun demikian, pergeseran interaksi yang lebih banyak di dunia maya atau di media sosial, membuat akademisi ilmu politik, sosiologi dan ilmu komunikasi perlu memperhatikan apa yang terjadi di media baru tersebut. Partisipasi di dalam jaringan yang mencakup penandatanganan petisi dalam jaringan, ekspresi politik di media sosial, interaksi vertical di media sosial, mobilisasi

politik di media sosial, hingga kegiatan kampanye sukarela di media social (Yusuf, 2023). Partisipasi politik di dalam jaringan bersama dengan partisipasi politik nyata sebagaimana yang dirumuskan oleh Rush & Althoff (1971) menjadi sebuah bentuk partisipasi politik kontemporer yang dapat ditemukan pada masa ini.

Pandangan Demokrasi

Proses demokrasi tidak hanya ditemui pada pemerintahan skala besar seperti sebuah negara, sebuah organisasi atau kelompok dapat menyebut dirinya demokrasi apabila mendukung inklusi, peluang keterlibatan, dan pemahaman yang tercerahkan (Gastil, 2007; Yusuf, 2023). Inklusi berarti semua orang sama pentingnya dalam pengambilan keputusan, tidak ada satu golongan atau kelompok yang dikecualikan. Di samping itu semua orang juga memiliki peluang untuk berperang dalam pengambilan keputusan, terlepas dari latar sosio ekonomi orang tersebut, ia berkesempatan untuk memimpin. Pemahaman yang tercerahkan berarti masyarakat memahami masalah-masalah yang mereka hadapi, dari hulu hingga hilir, sehingga mereka dapat memetakan kebijakan macam apa yang mereka butuhkan. Mereka dapat berkomunikasi dengan penguasa untuk menyampaikan kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan objek yang diamati, yakni partisipasi politik dan padangan mengenai demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Kuesioner dipilih dalam penelitian ini karena data yang akan digambarkan merupakan data kuantitatif mengingat besarnya target responden sehingga dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, waktu penelitian ini adalah pada bulan Oktober 2023- November 2023. Populasi dalam penelitian ini yang berjudul “Partisipasi Politik Generasi Muda Untuk Mendukung Eksistensi Demokrasi di Kota Makassar (Studi komunikasi politik)” meliputi generasi muda Kota Makassar. Berdasarkan data BPS tahun 2022, populasi generasi muda di Kota Makassar sebanyak 739.480 jiwa. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 393 orang berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan angket atau kuisioner yang disebarakan kepada responden yang merupakan objek dari penelitian ini. Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu teknik yang digunakan untuk pengujian, pengukuran, dan berdasarkan perhitungan matematika dan statistik.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah bagian}}{\text{Keseluruhan}} \times 100$$

Dalam penelitian ini peneliti untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan menggunakan survey yaitu data dari angket (kuesioner) yang telah dibagikan kepada responden itu menjadi sebuah hasil dari penelitian.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Item	Skala Pengukuran
Partisipasi Politik	Partisipasi politik tidak langsung atau Dalam jaringan (Yusuf, 2023)	1. Apakah Anda pernah membuat petisi online? 2. Apakah Anda pernah menandatangani petisi online?	Binary (Ya/Tidak)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah Anda mengungkapkan pemikiran Anda mengenai politik pemerintahan di media sosial Anda? 4. Apakah Anda mengikuti akun media sosial politisi atau pejabat pemerintah? 5. Apakah Anda mengomentari status media sosial yang dibuat oleh aktivis, politisi atau pejabat pemerintah? 6. Apakah Anda pernah berpartisipasi pada pendorongan sebuah tagar politik/protes agar menjadi trending topik? 7. Apakah Anda pernah membagikan status media sosial yang dibuat oleh aktivis, politisi atau pejabat pemerintah? 8. Apakah Anda pernah mengampanyekan seorang calon anggota legislative/kepala daerah/presiden di akun media sosial Anda? 	
	Partisipasi politik langsung/ luar jaringan (Rush & Althoff, 1971)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda pernah menduduki jabatan politik atau administratif? 2. Apakah Anda pernah mencari jabatan politik atau administratif pemerintahan? 3. Apakah Anda pernah menjadi anggota aktif (pengurus) dalam suatu organisasi politik? 4. Apakah Anda pernah menjadi anggota pasif (anggota biasa) dalam suatu organisasi politik? 5. Apakah Anda pernah menjadi anggota aktif (pengurus) dalam suatu organisasi semi politik? (Kelompok Penekan seperti NU & Muhammadiyah dan afiliasinya) 6. Apakah Anda pernah menjadi anggota pasif (anggota biasa) dalam suatu organisasi semi politik? (Kelompok Penekan seperti NU & Muhammadiyah dan afiliasinya) 7. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam rapat umum? 8. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam kampanye? 9. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam demonstrasi atau aksi protes? 10. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam diskusi politik informal? 11. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam pemungutan suara (voting) 	Binary
Demokrasi	Inklusif, Peluang keterlibatan, Pemahaman yang tercerahkan (Gastil, 2007)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda merasa bahwa politik di Indonesia membolehkan semua orang untuk berpendapat? 2. Apakah Anda merasa bahwa siapapun bisa mengekspresikan pendapat politiknya di Indonesia? 3. Apakah Anda merasa bahwa siapapun bisa terpilih menjadi pemimpin 	Binary

-
- (caleg/kepala daerah/pemimpin) terlepas dari latar belakangnya?
4. Apakah menurut Anda di Indonesia suku apapun bisa menjadi pemimpin nasional?
 5. Apakah menurut Anda semua orang bisa terjun ke politik di Indonesia?
 6. Apakah menurut Anda rakyat Indonesia sudah sangat memahami sistem politik pemerintahan?
 7. Apakah menurut Anda pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai sistem politik dan pemerintahan yang cukup?
 8. Apakah menurut Anda rakyat Indonesia telah mengetahui makna dari demokrasi?
-

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 382 orang, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang merupakan generasi muda kota Makassar. Karakteristik responden yang menjadi sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin			
No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	88	22.4 %
2	Perempuan	304	77.6%
Jumlah Total		392	100%

Sumber: Hasil analisis data lembar observasi

Pengelompokkan responden berdasarkan interval usia yang sesuai dengan kondisi generasi muda memberikan pemahaman bagaimana generasi muda dari berbagai kelompok usia memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda dalam partisipasi komunikasi politik. Dengan pengelompokan usia seperti ini, dapat dianalisa perbedaan dalam preferensi, partisipasi dan pandangan politik antara kelompok usia yang berbeda. Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 1.2.

Table 3

Karakteristik Responden berdasarkan usia					
	Jumlah	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Usia	392	16	30	20,80	2.592

Partisipasi Politik Generasi Muda di Kota Makassar

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik. Idealnya tujuan partisipasi politik tersebut tidak lain adalah untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan yang dirumuskan tersebut merupakan kunci dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menduduki jabatan politik atau administratif merupakan hirarki tertinggi dari partisipasi politik. Sedangkan hirarki terendah dari keterlibatan politik adalah orang yang sama sekali apatis, yaitu orang yang tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun. Semakin tinggi hirarki partisipasi politik maka semakin rendah tingkat keterlibatan masyarakat, seperti terlihat pada diagram hirarki partisipasi politik, dimana garis vertikal segitiga melambangkan hierarki (Rush & Althoff, 1971). Lebih lanjut proses demokrasi tidak hanya ditemui pada pemerintahan skala besar seperti sebuah negara, sebuah organisasi atau kelompok dapat menyebut dirinya demokrasi apabila mendukung inklusi, peluang keterlibatan, dan pemahaman yang tercerahkan (Gastil, 2007; Yusuf, 2023).

Partisipasi politik di kalangan generasi muda Kota Makassar dapat diukur dalam prosentase berdasarkan hasil penelitian. Ditemukan bahwa dalam aktivisme petisi online, hanya 15.8% dari total generasi muda (62 orang) yang pernah terlibat, sementara 39.7% (156 orang) pernah menandatangani petisi online. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat partisipasi ini masih tergolong rendah, dengan sebagian besar generasi muda (60.3%) tidak familiar dengan partisipasi politik melalui petisi. Terkait interaksi dengan pejabat melalui media sosial, 54.9% dari total generasi muda (216 orang) mengikuti akun politisi atau pejabat pemerintah. Sementara itu, partisipasi dalam pembagian status media sosial yang dibuat oleh aktivis atau pejabat pemerintah mencapai 43.2%, dengan 170 orang yang pernah melakukannya dari total 393 generasi muda. Secara khusus, partisipasi dalam kampanye daring mencapai 18.1%, yang pernah melakukannya. Kesimpulannya, meskipun sebagian generasi muda terlibat dalam beberapa bentuk partisipasi politik online, masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik yang dapat memengaruhi proses perumusan kebijakan.

Setelah pembahasan terkait partisipasi politik dalam jaringan (Yusuf, 2023) selanjutnya ialah partisipasi politik luar jaringan yang mencakup Petisi ekspresi politik di media social, Intraksi dengan pejabat, mobilisasi daring, dan kampanye daring.

Dalam partisipasi politik responden mengenai jabatan politik termuat dua pertanyaan yang diajukan, yakni apakah anda pernah mencari jabatan politik atau administratif pemerintahan dengan jumlah 41 orang dari total 393 orang yang menjawab pernah. Sedangkan yang pernah menduduki jabatan politik atau administratif yaitu berjumlah 17 dari total 393 orang atau sekitar 8.9% dari generasi muda pernah menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik, sedangkan 9.7% menjadi anggota pasif.

Adanya 9.7% generasi muda yang pernah menjadi pengurus organisasi semi politik menunjukkan kecenderungan terlibat dalam kelompok penekan. Meskipun hampir setengah generasi muda pernah berpartisipasi dalam rapat umum (44.3%), partisipasi dalam diskusi politik informal hanya sebesar 27.8%. Sebagian generasi muda (34.4%) berpartisipasi dalam kampanye, sementara sebagian besar (65.6%) tidak. Meskipun demikian, partisipasi dalam demonstrasi mencapai 27.6%, menunjukkan ketertarikan pada bentuk aksi politik langsung. Paling mencolok, partisipasi dalam pemungutan suara tinggi, dengan 73.1% generasi muda pernah melakukan voting. Meskipun sebagian besar generasi muda tidak aktif dalam beberapa aktivitas politik, tingginya partisipasi dalam pemungutan suara mencerminkan kesadaran akan peran fundamental dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, gambaran generasi muda dalam mendukung eksistensi demokrasi di kota Makassar yang paling banyak dilakukan adalah berpartisipasi dalam pemungutan suara atau voting, dipilih oleh 286 responden jumlah persentase 73,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik yang paling banyak dilakukan anak muda adalah menggunakan haknya untuk mencoblos saat pemilihan umum, sedangkan yang pernah menduduki jabatan politik atau administratif berjumlah 17 responden dengan persentase 4,3%. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rush dan Althoff bahwa hierarki yang tertinggi dari partisipasi politik adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apatis secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total, semakin tinggi hirarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Pandangan Mengenai Demokrasi Di Indonesia

Pandangan generasi muda kota Makassar terkait demokrasi akan dijabarkan dengan pandangan mengenai inklusivitas, peluang keterlibatan, dan pemahaman yang tercerahkan. Pandangan generasi muda mengenai inklusivitas dapat diamati pada temuan bahwa generasi muda di Kota Makassar menunjukkan sikap positif terhadap demokrasi dan inklusivitas dalam partisipasi politik. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa sebanyak 64.9% responden berpendapat bahwa politik di Indonesia memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpendapat, sementara 35% menyatakan sebaliknya. Selanjutnya, pada pertanyaan apakah siapapun bisa mengekspresikan pendapat politiknya di Indonesia, 73.7% responden menjawab "YA," menunjukkan tingkat dukungan yang signifikan.

Selanjutnya untuk factor peluang keterlibatan, hasil penelitian ini memperlihatkan optimisme terkait peluang keterlibatan dalam politik. Mayoritas generasi muda (62.6%) percaya bahwa siapapun bisa terpilih menjadi pemimpin, dan 86.0% meyakini bahwa suku apapun bisa menjadi pemimpin nasional. Meskipun terdapat 37.4% responden yang meragukan peluang tersebut, hasil ini tetap mencerminkan semangat inklusivitas dalam perspektif pemilihan pemimpin dan keberagaman suku.

Sementara untuk bahasan terkait factor pemahaman yang tercerahkan, melalui survey juga ditemukan bahwa pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan serta sosialisasi mengenai hal tersebut masih perlu ditingkatkan. Meskipun 70.3% generasi muda menyatakan bahwa semua orang bisa terjun ke politik di Indonesia, hanya 17.1% yang menganggap bahwa rakyat telah memahami sistem politik pemerintahan. Namun, pertanyaan yang menonjol adalah tentang pemimpin nasional, di mana 86.0% responden meyakini bahwa suku apapun bisa menjadi pemimpin.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa aspek, kesimpulannya menunjukkan bahwa generasi muda di Kota Makassar cenderung mendukung demokrasi inklusif dengan keyakinan pada kesetaraan partisipasi politik dan peluang keterlibatan yang luas. Tetapi, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait sistem politik dan pemerintahan secara menyeluruh.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung demokrasi langsung atau melalui perwakilan (demokrasi Perwakilan) demokrasi juga dapat diartikan sebagai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berbicara di depan umum serta bebas dipilih dan memilih secara langsung bebas dan rahasia. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas, jika diperhatikan data hasil observasi partisipasi politik generasi muda di kota Makassar, di peroleh hasil generasi muda lebih aktif pada tingkatan terendah demokrasi yaitu pada pemilihan umum (voting).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisis dan di interpretasi, maka dapat dinyatakan kesimpulan bahwa gambaran partisipasi politik generasi muda di kota Makassar yaitu jika semakin tinggi herarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang. Sedangkan semakin rendah herarki partisipasi politik semakin besar kuantitas keterlibatan orang-orang. Pandangan generasi muda di kota Makasar mengenai demokrasi semua orang sama pentingnya dalam pengambilan keputusan, tidak ada satu golongan atau kelompok yang dikecualikan. Di samping itu semua orang juga memiliki peluang berperan dalam pengambilan keputusan, terlepas dari latar sosio ekonomi peran tersebut, ia berkesempatan untuk memimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Abugaza, A. (2013). *Social media politica: Gerak massa tanpa lembaga*. PT. Tali Writing & Publishing House.

- Damarjati, D. (2019, December 31). *2019 Tahunnya Aksi Massa: Mahasiswa-Pelajar Demo di Mana-mana*. <https://news.detik.com/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massa-mahasiswa-pelajar-demo-di-mana-mana>
- Fitri, N. (2012). *Resolusi Konflik Mengatasi Demonstrasi Anarki Mahasiswa (Studi Kasus Perguruan Tinggi Islam Makassar)*. https://www.academia.edu/112200627/Resolusi_Konflik_Mengatasi_Demonstrasi_Anarki_Mahasiswa_Studi_Kasus_Perguruan_Tinggi_Islam_Makassar
- Gastil, J. (2007). *Political Communication and Deliberation*. SAGE Publications.
- Gil de Zúñiga, H., Molyneux, L., & Zheng, P. (2014). Social Media, Political Expression, and Political Participation: Panel Analysis of Lagged and Concurrent Relationships. *Journal of Communication*, 64(4), 612–634. <https://doi.org/10.1111/jcom.12103>
- Hasse, J. (2012). Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Jurnal Studi Pemerintahan*. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0004>
- Heriyanto, T. (2015, March 26). *2014, Pengguna Internet Indonesia Capai 88,1 Juta*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150326134506-185-42064/2014-pengguna-internet-indonesia-capai-881-juta>
- Ida, R., Saud, M., & Mashud, M. (2020). Persistence of social media on political activism and engagement among Indonesian and Pakistani youths. *International Journal of Web Based Communities*, 16(4), 378–395. <https://doi.org/10.1504/IJWBC.2020.111361>
- Lindawati, L. (2018). Pola Akses Berita Online Kaum Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36734>
- Muhajir, A., & Susanti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Demonstrasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 3. <https://doi.org/10.26618/jed.v3i2.1935>
- Primadi, A. (2013). *KONSTRUKSI KEKERASAN POLITIK MAHASISWA MAKASSAR* [Skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA]. <http://lib.unair.ac.id>
- Rush, M., & Althoff, P. (1971). *An Introduction to Political Sociology*. Nelson.
- Suwana, F. (2020). What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. *Information, Communication & Society*, 23(9), 1295–1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>
- Wanma, A. V. (2015). Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1123.
- Winarno, S. (2019). Efek Echo Chamber Demonstrasi. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 0, Article 0. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/article/view/3310>
- Yusuf, R. I. (2023). *Komunikasi Politik: Seni dan Teori*. Deepublish.
- Yusuf, R. I., Nahdiana, N., Hukma, A., Andriansyah, A., & Rahayu, P. B. (2023). The Moderating Role of Knowledge in The Effect of News Access on Students' Political Participation in Makassar. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/jed.v8i1.9644>